

BAB 3

Permasalahan, Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan Agenda Pembangunan Kabupaten Musi Rawas 2005 - 2010

A. Permasalahan

Berbagai tantangan dan peluang seperti yang telah diuraikan pada Bab 2 mengenai gambaran umum Kabupaten Musi Rawas, dapat ditemui berbagai permasalahan, seperti diuraikan sebagai berikut:

Pertama. Rendahnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi daerah. Rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang mendasar. Kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata.

Kedua. Kualitas SDM Kabupaten Musi Rawas masih rendah yang tercermin dari kondisi IPM Kabupaten Musi Rawas yang masih relatif rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Indonesia. Penyebab masalah ini adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, sumberdaya produktif dan teknologi; dan kurang tersedianya prasarana dan sarana yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan.

Ketiga. Pengelolaan sumberdaya masih mengabaikan aspek-aspek fungsi lingkungan, sehingga menimbulkan konflik kepentingan ekonomi dengan lingkungan. Kegiatan ekonomi selama ini, cenderung lebih mengutamakan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam dan mengabaikan aspek kelestarian. Selain itu lemahnya organisasi pengelola juga menjadi bagian dari permasalahan ini. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan ke dalam sistem organisasi maupun program kerja pemerintah daerah masih belum berjalan. Degradasi hutan yang disebabkan berbagai kegiatan illegal meningkat bahkan sampai ke dalam kawasan lindung

seperti di Kawasan TNKS. Degradasi hutan dan lahan yang terus berlanjut dapat menyebabkan daya dukung ekosistem terhadap pertanian dan pengairan semakin menurun dan mengakibatkan kekeringan dan banjir.

Keempat. Kesenjangan pembangunan antar kawasan, kecamatan, kota, desa, kelompok pendapatan dan lain-lain relatif lebar. Masih terdapat kawasan yang sangat terpencil dan tertinggal, seperti di kawasan penyangga TNKS, yang terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Ulu Rawas, Karang Jaya, Selangit dan kecamatan-kecamatan dengan akses yang sangat sulit seperti BTS Ulu, Ulu Rawas, Rawas Ilir dan Nibung.

Jika dilihat kesenjangan antar kota dan desa, terjadi karena selama beberapa periode pembangunan perkotaan (investasi ekonomi) yang berupa infrastruktur dan kelembagaan cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan, khususnya Lubuklinggau dan sekitarnya. Akibatnya, kota mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sedangkan wilayah perdesaan relatif tertinggal. Sampai saat ini belum ada kota-kota yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, baik sebagai pusat pemerintahan maupun sebagai pusat perdagangan, pendidikan dan sosial lainnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk membangun kota-kota kecamatan dengan memperhatikan potensi lokal dan peluang di setiap kecamatan. Selain itu dalam lima tahun ke depan harus membangun sarana dan prasarana perkantoran untuk mendekatkan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakatnya.

Ketertinggalan wilayah perdesaan juga disebabkan rendahnya produksi dan produktivitas, pertanian, terbatasnya akses petani terhadap sumber daya permodalan, rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian/perdesaan, dan makin rendahnya nilai tukar sektor pertanian sebagai akibat belum tumbuhnya agroindustri di perdesaan. Akibatnya kesejahteraan masyarakat di perdesaan, yang mencakup sekitar 87 %, khususnya petani masih sangat rendah tercermin jumlah penduduk miskin yaitu 179.788 jiwa (Data 2004).

Permasalahan lain yang berkaitan dengan Sektor pertanian, adalah: (i) rendahnya kesejahteraan petani, (ii) lahan pertanian yang semakin menyempit; (iii) terbatasnya akses ke sumberdaya produktif, terutama akses terhadap sumber permodalan, (iv) rendahnya kualitas SDM Pertanian, (v) penguasaan teknologi masih rendah, (vi) belum optimalnya pengelolaan sumberdaya peternakan dan perikanan, (vii) terjadinya penurunan hasil hutan alam sementara hasil hutan tanaman dan hasil non kayu belum dimanfaatkan secara optimal, (viii) lemahnya

infrastruktur pertanian, (ix) belum berkembangnya agroindustri perdesaan, (x) belum ada penerapan konsep pengembangan wilayah yang berbasis agropolitan, (xi) Secara khusus perwilayahan komoditas potensial belum dilaksanakan, penataan ruang dan master plan sektor pertanian belum akurat, sehingga belum ada spesialisasi antar wilayah dan antar desa, (xii) kemitraan antara petani dengan pengusaha pertanian skala besar masih belum berpihak kepada petani, (xiii) iklim usaha dan kebijakan masih belum berpihak kepada petani (xiv) keamanan belum kondusif di wilayah pedesaan .

Kelima. Kondisi infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energi, pos, telekomunikasi, sumberdaya air, perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan, belum mendukung upaya percepatan pembangunan ekonomi dan sosial. Kemampuan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur (di antaranya jaringan jalan, jaringan irigasi, air bersih dan fasilitas sanitasi di perdesaan, pelabuhan sungai dan listrik perdesaan) masih terbatas, sedangkan Peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan infrastruktur masih sangat rendah.

Beberapa masalah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian antara lain. *Pertama*, sekitar 40 persen jaringan irigasi, baik Irigasi Teknis, Setengah Teknis maupun irigasi Desa dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Alih fungsi lahan beririgasi pada daerah lumbung pangan terutama di kecamatan Tugumulyo, cenderung meluas sehingga secara terus-menerus dan signifikan mengurangi areal lahan beririgasi. Selain itu kelangkaan air yang semakin mengancam akibat menurunnya daya dukung lingkungan dapat memicu konflik air yang memungkinkan timbulnya berbagai bentuk instabilitas. *Kedua*, menurunnya pelayanan transportasi terutama di bidang prasarana dan sarana yang operasi, pemeliharaan dan pembangunannya masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, baik jalan negara, jalan provinsi maupun Jalan Kabupaten dan Jalan Desa. *Ketiga*, masih besarnya ketersediaan rumah yang belum layak huni yang diperkirakan mencapai ribuan yang tersebar diseluruh wilayah disamping meluasnya kawasan kumuh yang dihuni oleh penduduk. *Keempat*, meningkatnya kesenjangan antara pasokan dan permintaan tenaga listrik dengan tidak adanya pembangunan proyek pembangkit listrik, baik pada sistem internal maupun sistem interkoneksi dengan pembangkit di Tanjung Enim dan Curup. *Kelima*, Kurang tersedianya infrastruktur strategis seperti irigasi, terminal peti

kemas dan pembangkit listrik skala besar, telah menyebabkan aktifitas perekonomian dan sosial budaya terhambat.

Keenam. Belum memiliki infrastruktur strategis yang dapat memacu perekonomian daerah seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD di bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi dan lain – lain.

Ketujuh. Belum tuntasnya penanganan secara menyeluruh terhadap aksi kamtibmas, khususnya di beberapa kecamatan, masih sering terjadi keributan antar warga. Kearifan lokal dan dukungan kehidupan beragama sudah mulai menipis di beberapa kawasan.

Tingginya angka kriminalitas, narkoba dan jenis kejahatan lainnya di beberapa kawasan, seperti kawasan di sepanjang jalan nasional dan jalan lintas Muara Beliti – Kabupaten Banyuasin. Meskipun terkendali, variasi kejahatan konvensional cenderung meningkat dengan kekerasan yang meresahkan masyarakat.

Kedelapan. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum dapat diterapkan sepenuhnya mengingat beberapa peraturan tersebut belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia; tumpang tindih peraturan perundangan di tingkat pusat dan daerah yang menghambat iklim usaha yang pada gilirannya menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat; belum ditegakkannya hukum secara tegas, adil dan tidak diskriminatif, serta memihak kepada rakyat kecil; serta belum dirasakan putusan hukum oleh masyarakat sebagai suatu putusan yang adil dan tidak memihak melalui proses yang transparan. Dilain pihak, pengembangan regulasi masih lamban atau belum dapat mengimbangi perubahan sosial – ekonomi, apalagi kalau dikaitkan dengan pengaruh global.

Kesembilan. Rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat antara lain karena tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan; rendahnya kinerja sumberdaya aparatur; belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan; rendahnya kinerja aparatur; sehingga belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, serta pelayanan aparatur dan publik masih rendah.

Kesepuluh. Masih lemahnya kelembagaan politik, penyelenggara negara dan kemasyarakatan; dan masih rendahnya internalisasi nilai-nilai demokratis dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara.

B. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2010

Dengan memperhatikan kondisi objektif di daerah dan sadar sepenuhnya akan kompleksitas permasalahan yang melingkupi pembangunan di Kabupaten Musi Rawas, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2010 sebagai berikut;

"Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah berbasis Agraris"

C. Misi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2010

Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan tiga Misi pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2005–2010, yaitu:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah
3. Meningkatkan Pelayanan Publik

D. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2010

1) Strategi

Pelaksanaan agenda pembangunan di atas pada dasarnya diarahkan untuk mengurangi penduduk miskin, peningkatan ekonomi daerah melalui konsep pembangunan wilayah agropolitan dan peningkatan kapasitas pelayanan publik. Agar misi pembangunan dapat dicapai secara efektif, maka Pengembangan program pembangunan yang digerakkan berdasarkan ide yang kuat dan mendasar yang dilakukan secara serentak, terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan serta menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung sesuai dengan karakter masing-masing wilayah, dengan menggunakan strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur strategis untuk merangkai *agropolitan distrik* menjadi jaringan regional
2. Membangun *agropolitan district* dan *agropolitan center* untuk memperluas hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang lebih luas
3. Pengembangan fasilitas pelayanan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, dan informasi) di setiap agropolitan distrik.
4. Memadukan usaha di bidang pertanian dan non pertanian untuk memperbanyak kesempatan kerja dan menurunkan jumlah pengangguran
5. Menggunakan tenaga kerja lokal yang lebih efektif, dengan mengarahkan usaha-usaha yang mengembangkan potensi sumberdaya alam di setiap *agropolitan distrik*.
6. Membangun dan memperbaiki sarana perhubungan antar agropolitan district dan *agropolitan center* untuk merangkai *agropolitan distrik* menjadi jaringan regional dan menyediakan lapangan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan kota induk terdekat
7. Menyusun pemerintahan mandiri yang dapat menetapkan prioritas pembangunan dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan aspirasi masyarakat
8. Menyediakan sumber keuangan yang cukup untuk membangun agropolitan distrik, agropolitan center, dan pembiayaan infrastruktur strategis

2) Arah Kebijakan

Berdasarkan visi, misi dan strategi pembangunan lima tahun ke depan, maka perlu dirumuskan arah kebijakan umum sebagai berikut:

1. Membangun landasan instrumen pembangunan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi daerah
2. Peningkatan kinerja dan kapasitas manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelayanan publik, dan efisiensi pembangunan
3. Membangun, memperluas dan memperkuat jaringan kerjasama (*networking*), kemitraan sinergis antar pelaku pembangunan, dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi lain.
4. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi hak-hak dasar pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja

5. Mengembangkan dan menata *agropolitan distrik* dan *agropolitan center*
6. Membangun, memelihara dan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan *agropolitan distrik dan agropolitan center* dan peningkatan ekonomi daerah
7. Meningkatkan produksi, kualitas, dan daya saing produk pertanian dan produk agroindustri
8. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk pertanian, agroindustri dan produk perdesaan lainnya
9. Meningkatkan pelayanan publik terutama di bidang kependudukan dan kesehatan, pendidikan, perizinan, transportasi, dan air bersih
10. Mengembangkan ekonomi daerah melalui usaha-usaha yang berbasis sumberdaya lokal dan kemitraan sinergis
11. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, dan meningkatkan kelembagaan untuk meningkatkan posisi tawar
12. Mengurangi biaya transaksi dan ekonomi biaya tinggi, serta meningkatkan investasi
13. Memperkuat akses masyarakat terhadap sumberdaya produktif, terutama kaum perempuan
14. Mengembangkan modal sosial dengan mendorong wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan dan dialog antar umat beragama
15. Meningkatkan kapasitas dan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten

E. Agenda Pembangunan Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2010

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan tersebut di atas, karena Kabupaten Musi Rawas merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari Provinsi Sumatera Selatan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ditetapkanlah tiga agenda Pembangunan Kabupaten Musi Rawas 2005-2010 sebagai berikut:

1. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2. Agenda Meningkatkan Perekonomian Daerah
3. Agenda Meningkatkan Pelayanan Publik